1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. Perkembangan Inflasi triwulan III

    Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Provinsi Maluku ke depan perlu difokuskan pada penguatan strategi 4K melalui pengamanan pasokan pangan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah, peningkatan produksi pangan lokal, serta penguatan kelancaran distribusi antarpulau. Tingginya tekanan kelompok transportasi dan karakteristik geografis Maluku menunjukkan pentingnya intervensi terhadap biaya logistik sebagai bagian integral dari pengendalian inflasi. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan harga dan pasokan yang lebih responsif sebagai *early warning system*, disertai penguatan cadangan pangan dan antisipasi gangguan cuaca. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara terkoordinasi melalui TPID dengan pendekatan yang spesifik berdasarkan karakteristik komoditas dan wilayah.

    Pada September 2026, secara tahunan Provinsi Maluku mencatat inflasi sebesar 3,91% (yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 3,68% (yoy) dan berada di atas sasaran inflasi nasional 2,5% ± 1%. Secara spasial, kondisi harga pada September cukup beragam. Kabupaten Maluku Tengah mengalami deflasi sekitar 1,19% (mtm), Kota Tual mengalami deflasi 0,10%, sedangkan Kota Ambon masih mencatat inflasi sebesar 0,68% (mtm). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga di Maluku tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing wilayah, terutama perbedaan pola pasokan dan distribusi antarpulau.

    Dari sisi kelompok pengeluaran, tekanan inflasi Maluku masih berkaitan erat dengan volatile food dan transportasi. Laporan Perekonomian Provinsi Maluku menunjukkan bahwa inflasi daerah pada periode sebelumnya banyak dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau serta transportasi. Struktur geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menyebabkan biaya logistik dan kelancaran distribusi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harga barang antardaerah.

    2. Perkembangan Harga Barang & Jasa

    ada Triwulan III 2026, perkembangan harga kebutuhan pokok di Maluku perlu dilihat terutama melalui komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan, gula pasir, minyak goreng, serta komoditas yang berkaitan dengan transportasi dan energi.

    Komoditas pangan tersebut memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan pasokan. Ketika terjadi gangguan cuaca, keterlambatan distribusi, kenaikan biaya angkutan, atau penurunan produksi di daerah pemasok, harga di Maluku dapat meningkat relatif cepat. Sebaliknya, ketika pasokan kembali normal dan distribusi berjalan lancar, tekanan harga dapat segera mereda. Karakteristik tersebut terlihat dari perubahan inflasi bulanan Maluku yang cukup tajam selama Triwulan III, dari deflasi pada Juli menjadi inflasi pada Agustus dan kembali deflasi pada September.

    Komoditas transportasi juga menjadi perhatian karena kondisi geografis Maluku menyebabkan konektivitas laut dan udara memiliki peran penting dalam distribusi barang dan mobilitas

masyarakat. Pada Agustus 2026, kelompok transportasi merupakan salah satu kelompok dengan inflasi tahunan tertinggi di Maluku, yaitu sekitar 12,13% (yoy). Oleh karena itu, perubahan tarif angkutan, harga bahan bakar, biaya logistik, serta kelancaran transportasi antarpulau tetap menjadi faktor risiko yang perlu dimonitor.

2. Risiko dan Tantangan ke Depan

Risiko inflasi Provinsi Maluku pada periode berikutnya terutama berasal dari empat faktor utama.

Pertama, risiko cuaca dan gangguan produksi pangan. Kondisi cuaca ekstrem berpotensi mengganggu produksi maupun distribusi komoditas pangan sehingga dapat meningkatkan harga terutama cabai, bawang, beras, telur, dan daging ayam. Bank Indonesia juga menempatkan dampak gangguan cuaca sebagai salah satu risiko penting terhadap volatile food.

Kedua, risiko distribusi dan biaya logistik antarpulau. Karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat stabilitas harga sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut dan udara. Keterlambatan kapal, keterbatasan konektivitas, kenaikan biaya angkutan, maupun gangguan cuaca laut dapat menyebabkan disparitas harga antara wilayah sentra konsumsi dan daerah pemasok.

Ketiga, risiko kenaikan harga energi dan transportasi. Perubahan harga BBM nonsubsidi maupun tarif transportasi dapat memberikan tekanan langsung dan tidak langsung terhadap harga barang dan jasa. Pada September 2026, secara nasional kelompok administered prices masih mencatat inflasi tahunan sebesar 3,25%, sementara komoditas bensin dan solar menjadi salah satu penyumbang perubahan harga.

Keempat, risiko peningkatan permintaan masyarakat pada periode tertentu, terutama menjelang hari besar keagamaan, libur panjang, atau peningkatan aktivitas ekonomi. Jika peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi, tekanan harga dapat meningkat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan pengendalian inflasi Provinsi Maluku pada Triwulan III 2026 terutama bersumber dari kerentanan pasokan pangan, tingginya biaya distribusi antarpulau, tekanan harga transportasi, disparitas harga antarwilayah, serta risiko gangguan cuaca terhadap produksi dan distribusi pangan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi Maluku tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi harga pada tingkat konsumen, tetapi perlu diperkuat melalui pendekatan hulu–hilir yang mencakup peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan dan stok pangan, efisiensi logistik, kerja sama antardaerah, serta sistem pemantauan harga dan pasokan yang lebih responsif. Strategi tersebut sejalan dengan pendekatan 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang terus diperkuat TPID Maluku.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku pada Triwulan III Tahun 2026 diarahkan pada penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pendekatan tersebut menjadi penting karena karakteristik inflasi Maluku masih dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* dan sensitivitas distribusi akibat kondisi geografis kepulauan. Bank Indonesia Maluku juga memprakirakan inflasi 2026 tetap berada dalam sasaran nasional 2,5% ± 1%, dengan dukungan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

1. Penguatan keterjangkauan harga

Pemerintah daerah bersama TPID melakukan berbagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat, terutama komoditas yang memiliki volatilitas tinggi. Intervensi diarahkan untuk mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi melalui pemantauan harga dan pelaksanaan kegiatan stabilisasi pangan ketika terjadi tekanan harga. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian inflasi yang menempatkan stabilisasi pangan sebagai salah satu prioritas utama.

2. Menjaga ketersediaan pasokan dan keteahanan pasokan pangan

Kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan III juga diarahkan pada penguatan sisi pasokan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan produksi pangan daerah, penguatan ketahanan pangan serta optimalisasi kerja sama antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.

Bagi Maluku, kebijakan sisi pasokan mempunyai arti strategis karena ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga sejumlah komoditas pangan rentan terhadap gangguan produksi di daerah pemasok. Oleh karena itu, penguatan produksi lokal dan diversifikasi sumber pasokan menjadi bagian penting dari mitigasi risiko inflasi.

3. Penguatan kelancaran distribusi dan logistik

Kebijakan pengendalian inflasi juga diarahkan pada upaya memastikan distribusi barang berjalan lancar, khususnya distribusi pangan antarpulau. Kondisi geografis Maluku menyebabkan biaya dan waktu transportasi menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan harga. Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan pada tingkat pasar, tetapi juga melalui upaya mengurangi hambatan pada rantai distribusi.

Strategi nasional pengendalian inflasi 2026 secara eksplisit menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas dan kelancaran logistik pangan, termasuk fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit.

4. Pemantauan harga dan penguatan komunikasi

TPID juga melakukan pemantauan perkembangan harga dan kondisi pasokan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pemantauan menjadi semakin penting karena pergerakan inflasi Maluku selama Triwulan III cukup fluktuatif. Berdasarkan data BPS, Maluku mengalami deflasi 0,75% pada Juli 2026 dan kemudian inflasi 0,81% pada Agustus 2026.

Komunikasi kebijakan juga diperlukan untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah *panic buying* ketika terdapat informasi mengenai kenaikan harga atau kelangkaan komoditas.

Strategi komunikasi yang efektif menjadi salah satu dari empat pilar pengendalian inflasi yang ditekankan pemerintah dan Bank Indonesia.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi Triwulan III 2026 di Provinsi Maluku telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap stabilisasi harga, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan pada aspek struktural. Kebijakan 4K, penguatan ketahanan pangan, koordinasi TPID, dan GPIPS telah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga. Namun, tingginya sensitivitas inflasi terhadap pasokan pangan, biaya transportasi, distribusi antarpulau, serta perbedaan kondisi antarwilayah menunjukkan bahwa intervensi jangka pendek perlu dilengkapi dengan kebijakan struktural.

   Dengan demikian, arah kebijakan ke depan sebaiknya difokuskan pada tiga hal utama: (1) memperkuat produksi dan cadangan pangan lokal, (2) menurunkan kerentanan biaya distribusi antarpulau, dan (3) membangun sistem peringatan dini inflasi berbasis data komoditas dan wilayah. Pendekatan tersebut akan membuat pengendalian inflasi lebih preventif dan tidak hanya bergantung pada operasi pasar ketika harga telah mengalami kenaikan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Kedepan, pengendalian inflasi Provinsi Maluku perlu diarahkan pada penguatan kebijakan yang bersifat preventif dan berbasis data dengan tetap mengacu pada strategi 4K. Fokus kebijakan perlu diberikan pada peningkatan produksi dan ketersediaan pangan lokal, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penyediaan stok penyangga komoditas strategis, serta peningkatan efisiensi distribusi antarpulau. Selain itu, TPID perlu memperkuat sistem *early warning* yang mengintegrasikan perkembangan harga, stok, produksi, kondisi cuaca, dan biaya transportasi sehingga potensi tekanan inflasi dapat diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kenaikan harga yang lebih tinggi. Intervensi pasar dan Gerakan Pangan Murah juga perlu dilaksanakan secara lebih terarah berdasarkan komoditas dan wilayah yang mengalami tekanan.

   Dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Maluku, keberhasilan pengendalian inflasi ke depan sangat bergantung pada kemampuan menjaga kesinambungan pasokan dan memperlancar distribusi antarwilayah. Oleh karena itu, sinergi Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha, serta daerah pemasok perlu diperkuat melalui program yang terukur dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menurunkan volatilitas harga pangan, mengurangi disparitas harga antarwilayah, dan menjaga inflasi Maluku tetap berada dalam sasaran nasional.